LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022
BULAN APRIL DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Selasa, 10 Mei 2022

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris dan Kepala Bidang
2. Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional
3. Bendahara dan BPP
4. Pejabat Pengadaan
5. Pelaksana di masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 34,59 %

b.Keuangan = 6.234.570.053 (32,88%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.175.000			300.000		
1	Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan	6.175.000	25	4,86	300.000	(20,14)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	10.000.000			0		

1	Workshop Penyusunan PPRG bagi OPD Kab/Kota	10.000.000	100	0	0	(100)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat							
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	57.460.000			1.948.879		
1	Persiapan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW	7.466.000	100	30,51	1.948.879	(69,49)	SSK belum dilaksanakan
2	Pelaksanaan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW	16.294.000	100	0	0	(100)	SSK belum dilaksanakan
3	Pelaksanaan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui pembuatan buku panduan lansia perempuan	17.050.000	100	0	0	(100)	SSk belum terlaksana
4	Kegiatan Perjalanan Dinas DWP Provinsi Jawa Tengah ke Kab/ Kota	16.650.000	30	10	0	(20)	SSK belum terlaksana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000			1.000.000		
1	Rapat Koordinasi APSAI (Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia)	2.000.000	100	50	1.000.000	(50)	SSK belum terlaksana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							

	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	4.780.000			0		
1	Workshop Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pengelolaan Tribina	4.280.000	100	0	0	(100)	SSK belum terlaksana
2	Persiapan Workshop Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pengelolaan Tribina	500.000	100	0	0	(100)	SSK belum terlaksana

Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	9	0	0			

Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	1	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

1. Pada Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW, belum dapat dilaksanakan karena harus menyesuaikan dengan agenda dan kebutuhan BKOW.
2. Pada Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui pembuatan buku panduan lansia perempuan, belum dapat dilaksanakan karena harus menyesuaikan dengan agenda dan kebutuhan BKOW.
3. Rapat Koordinasi APSAI (Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia) belum dapat dilaksanakan karena menyesuaikan dengan kebutuhan mitra kerja/organisasi terkait
4. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pengelolaan Tribina, belum dapat dilaksanakan karena menyesuaikan dengan kebutuhan Kab/Kota yang menjadi lokus tribina.
5. Workshop Penyusunan PPRG bagi OPD Kab/Kota, belum dapat dilaksanakan karena menunggu hasil evaluasi pprg oleh KPPPA
6. Data yang bersumber dari New SIGA BKKBN, belum dipublish secara umum/belum dapat digunakan untuk melihat indikator kinerja yang berkaitan dengan KB dan dalduk

Upaya

1. Kegiatan yang berkaitan dengan mitra kerja BKOW, APSAI maupun mitra kerja/organisasi lain, akan menyesuaikan jadwal dan kebutuhan mitra kerja/organisasi terkait
2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pengelolaan Tribina, akan menyesuaikan dengan Kabupaten/kota yang menjadi lokus tribina
3. Kegiatan Workshop Penyusunan PPRG bagi OPD Kab/Kota, akan dilaksanakan setelah evaluasi APE yang dilakukan kementerian PPPA
4. Koordinasi dengan BKKBN terkait kebutuhan Data urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Kegiatan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) di Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di Kab/Kota
3. Penyusunan kebijakan PUG
4. Advokasi Pengembangan Kegiatan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan di Kabupaten Kota
5. Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan/ TPPO
6. Persiapan Advokasi Pembentukan PATBM
7. Persiapan Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan TPPPO
8. Persiapan Workshop Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pengelolaan Tribina

9. Workshop Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pengelolaan Tribina
10. Persiapan Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Rakor BPD AKU Jawa Tengah
11. Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Rakor BPD AKU Jawa Tengah
12. Pelaksanaan Penguatan Peran Serta Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Dialog Interaktif dan Halal bi Halal
13. Workshop peningkatan kualitas hidup lansia melalui kelompok BKL di Kabupaten Kebumen
14. Orientasi peningkatan kapasitas PPKBD Kab. Sukoharjo, Kendal, Kudus dan Wonogiri
15. Persiapan lomba implementasi kebijakan penyelenggaraan kampung KB
16. Rapat Koordinasi Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Kota Semarang
17. Monev Bulan Pelayanan KB Dalam Rangka HUT IBI di Kab. Klaten, Rembang, Purbalingga, Magelang, Tegal, Demak
18. Konsultasi terkait strategi capaian akseptor di BKKBN Pusat dan KIE ke Kemendagri
19. Penigkatan KIE melalui Lomba Vlog & Tiktok tentang KB

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian :

1. Para Kabid/Kasubag/Sub Koordinator pada masing-masing bidang/seksi selalu mencermati target kinerja baik fisik maupun keuangan serta realisasinya.
2. Apabila target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas.
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta Pejabat fungsional/sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan dan sub sub kegiatan.
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar mencermati manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal.
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD, Renstra dan RKPD harus semaksimal mungkin karena tahun 2022 sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dan RAB tahun 2023 dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya.

Capaian realisasi fisik dan keuangan Dinas Perempuan dan Anak sampai dengan bulan April 2022, sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Deviasi
1	Dinas Perempuan dan Anak	30.95	34.59	32.88	3.64
2	Sekretariat	33.15	35.49	34.15	2.35
3	Bidang KHPP	27.30	32.18	30.71	4.88
4	Bidang PHPA	24.59	31.94	30.46	7.35
5	Bidang KB KIE	31.64	40.66	36.21	9.02
6	Bidang DALDUK KS	18.26	21.17	17.07	2.92
7	Bidang Data Parmas	30.29	35.99	32.86	5.70

Demikian laporan pelaksanaan rapatkoordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan April 2022 untuk menjadikan periksa.

Semarang, Selasa, 10 Mei 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dra. RETNO SUDEWI, Apt.,MSi.,MM

NIP. 196811241993102001